

PENULISAN HUKUM
PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum*

Oleh:

TITA JIWANTY FITRI

201510110311288



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2019

**PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM
PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan Oleh:

TITA JIWANTY FITRI

201510110311288


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 25 Juli 2019


Pembimbing Utama,


Dr. Sulardi, SH., M.Si.

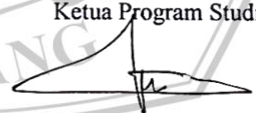
Pembimbing Pendamping,


Catur Wido Hicami, SH. M.Si., M.Hum

Dekan,


Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

SKRIPSI

Disusun oleh:

TITA JIWANTY FITRI

201510110311288

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 25 Juli 2019

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Sulardi, SH., M.Si.

Sekretaris : Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Penguji I : Dr. Haris, SH. MH.

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TITA JIWANTY FITRI

NIM : 201510110311288

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM
PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Agustus 2019

Tita Jiwanty Fitri

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil Alamin, tiada kata lain yang diucapkan penulis selain mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dan tidak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa perubahan dari zaman jahiliya menjadi zaman penuh dengan keilmuan yang selalu menjadi suritauladan bagi umat islam. Sesungguhnya sholat ku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah SWT.

Sungguh luas ilmu yang dimiliki oleh Allah SWT sehingga jika air laut di jadikan tinta maka tidak akan cukup untuk menulis ilmu yang dimiliki Allah SWT, kutipan hadist tersebut merupakan penyemangat penulis untuk selalu belajar dan menyelesaikan penulisan tugas. Penulisan tugas akhir ini merupakan tahapan akhir untuk meraih gelar studi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan untuk mengejar mimpi yang di cita-citakan oleh penulis serta merupakan pertanggung jawaban ilmu yang didapatkan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung atas terselesaikannya penulisan tugas akhir ini yang berjudul ***“Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”***. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Pertama, ucapan terimakasih kepada kedua orang tua bapak Bambang Wahyudi dan ibu Lilik Musiyati serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi, doa dan dukungan sampai terselesaikannya tugas akhir ini.
2. Terimakasih kepada bapak Dr. Fauzan M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Terimakasih kepada Bapak Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Terimakasih kepada Bapak Dr. Sulardi S.H., M.Si selaku dosen pembimbing satu yang sudah banyak membimbing dan memberikan

masuk disela-sela kesibukan beliau yang masih memberikan waktu untuk bimbingan sampai terselesaikannya penulisan ini.

5. Terimakasih kepada Ibu Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing dua yang sudah banyak membimbing dan memberikan masukan disela-sela kesibukan beliau sebagai Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang masih menyempatkan waktunya untuk bimbingan sampai terselesaikannya penulisan ini.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah banyak memberikan ilmunya selama perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
7. Terimakasih kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah banyak membantu dan memudahkan penulis untuk melengkapi syarat-syarat administrasi.
8. Terimakasih kepada seluruh Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang periode tahun 2017-2018 M yang sudah memberikan dinamika dan pengalaman berharga selama perkuliahan.
9. Terimakasih kepada kawan-kawan Kelas E angkatan tahun 2015 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan pengalaman selama kuliah.
10. Terimakasih kepada teman-teman terdekat yang sudah mendukung, menyemangati, dan mengingatkan agar menyelesaikan penulisan ini.

Penulisan tugas akhir ini sudah layak diujikan untuk penulis mendapatkan gelar Sarjana-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan oleh penulis untuk perbaikan kedepannya. Semoga penulisan tugas akhir ini bisa memberikan manfaat bagi pembangunan hukum kedepannya.

Penulis,

Tita Jiwanty Fitri

DAFTAR ISI

Lembar Cover	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hak Politik Warga Negara	16
1. Pengertian Hak Politik Warga Negara	16
2. Jenis Hak Dalam Hak Asasi Manusia	18
a. Hak Asasi Manusia Yang Bersifat <i>Derogable Right</i>	18
b. Hak Asasi Manusia Yang Bersifat <i>Non Derogable Right</i>	19
3. Pengertian Pencabutan Hak Politik	20
B. Tindak Pidana Korupsi	23
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	23
2. Jenis Tindak Pidana Korupsi	26
a. Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara	26
b. Korupsi Penyuapan	27
c. Korupsi Penggelapan Dalam	28
d. Korupsi Pemerasan	29
e. Korupsi Perbuatan Curang	30
f. Korupsi Benturan Kepentingan	30
g. Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Secara Hukum Nasional dan Hukum Internasional	32
1. Pengaturan Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Secara Hukum Nasional	32
a. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945	33
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia	35
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	36
d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	38
e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Tindak Pidana Korupsi	40
f. Peraturan Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah	40
g. Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009	45
2. Pengaturan Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Secara Hukum Internasional	55
a. <i>Universal Independent of Human Rights</i>	55
b. <i>International Covenant on Civil And Political Rights (ICCPR)</i>	57
B. Implikasi Hukum dari Adanya Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi	62
a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.sus/2014	64
b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195K/Pid.sus/2014	64
c. Kasus Korupsi Mantan Walikota Batu Eddy Rumpoko	66
d. Kasus Korupsi Mantan Walikota Malang	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas	
Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir	
Lampiran 3 : Berita Acara	
Lampiran 4 : Indeks	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pengaturan Pencabutan Hak Politik dalam Instrumen Hukum Nasional.....	47
Tabel 2	Pengaturan Pencabutan Hak Politik dalam Instrumen Hukum Internasional.....	59
Tabel 3	Implikasi Pencabutan Hak Politik	63



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit PT, Citra Aditya Bakti
- Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Budiardjo, M, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, Bandar Lampung, Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan
- Fuad Fachruddin, 2006, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*, Pustaka Alvabet
- Ibnu Santoso, 2011, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Cet I, Penerbit Gava Media : Yogyakarta
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI
- Muladi, 2002, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni
- Nadiatus Salama, 2010, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana
- S,F, Marbun dan Moh, Mahfud MD, 2000, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Penerbit Liberty
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Bantul : Thafa Media
- Yos Johan Utama, 2015, *Memahami Dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang*, Thafamedia : Yogyakarta
- Yudi Kristina, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bantul, Thafa Meia

JURNAL

Ade Fajar Rezki, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

Ansori, 2016, *Penghilangan Hak Politik perspektif Sistem Demokrasi*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila, Th, 1, Nomor 1

Azhar, 2009, *Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darusalam*, Jurnal Litigasi Volume 10, Bandung

Faisal, 2018, *Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Volume 9 No 2 September 2018

Fuad Fachruddin, 2006, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*, Pustaka Alvabet

Haliva Muharosa, 2016, *Tinjauan Yuridis terhadap Pencabutan Hak Politik bagi Terpidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Volume 3 No 1 Februari 2016

Muhammad Saleh dan Dimas Firdausy Hunafa, 2018, *Pemilu Berintegritas: Menggagas Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum*, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018

Osgar S, Matompo, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat*, Jurnal Media hukum Vol, 21 No,1 Juni 2014

Slamet Haryadi, *Reinterpretasi Tindak Pidana Korupsi Suap*, Jurnal AL-ADALAH Vol, XII, No, 3, Juni 2015

Tenang Haryanto dkk, *Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Purwokerto, Makalah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol,8 No,2 Mei 2008

Warid Anjari, 2015, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial Vol, 8 No, 1

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah

Putusan MK nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dan Pasal 50 ayat (1) huruf (f) dan (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

International Covenant On Civil And Political Rights

Universal Declaration of Human Rights

INTERNET

Ditjen Kementrian Hukum dan HAM, *Hak Politik Warga Negara* (sebuah *Perbandingan Konstitusi*), dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, diakses Tgl 26 April 2019

LAIN-LAIN

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : Jakarta

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum
NIP : 10611050472
Jabatan : Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :


Nama : Tita Jiwanty Fitri
Nim : 201510110311288

Dengan Judul Skripsi Pencabutan Hak Politik Terpisauna Korupsi
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Benar **BEBAS PLAGIASI**, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Agustus 2019
Kaprodi Fakultas Hukum


Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Scanned with
CamScanner